

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 035/O/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA MENJADI SMU
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMU

V. PROVINSI JAWA TIMUR

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 035/O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA MENJADI SMU
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMU

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah dan Kepurusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/Qn/1997 tentang Sekolah Menengah I (MTs) dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMAta) menjadi Sekolah Menengah Umum (SMU) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMU;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1939;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 29 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992;

Persetujuan Menteri Negara -Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997;

Memperhatikan

Peraturan Menteri Negara -Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7

Februari 1997;

Memperhatikan

Peraturan Menteri Negara -Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7

Februari 1997;

MEMUTUSKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA MENJADI SMU SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMU

BAB I

NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMU) di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Sekolah Menengah Umum, yang selanjutnya dalam Keputusannya disebut SMU

Pasal 2

- (i) Nomenklatur dan penomoran SMU diatur sebagai berikut:
- a. SMU yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMU yang bersangkutan;
 - b. SMU yang berlokasi di kotamadya/kota administratif, diberi nama sesuai nama kotamadya/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMU yang bersangkutan;
 - c. SMU yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMU yang bersangkutan;
 - d. SMU yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai dengan nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMU yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelembagaan SMU, urutan penomoran SMU ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan kelembagaan SMU yang bersangkutan.

permekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit batas

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMU adalah unit pelajaran teknis pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan beranggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.

- (2) SMU dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang atau lebih Wakil kepala

Pasal 4

SMU menciptakan tugas menyelenggarakan pendidikan umum program tiga tahun bagi tamatan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama atau yang sederajat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMU mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan umum sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua/wali siswa dari wakil;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMU.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMU terdiri atas:

- a. Kepala:

Jelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kepala adalah guru mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina guru tenaga pendidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 8

Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga pendidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 9

Urusan Tala Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketiaausaanaan dan kerumah tanggaan SMT, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang diunjuk oleh Kepala:
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja:
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagan organisasi SMU tercantum dalam Lampiran I Kepatuhan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kepala Urusan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam hal maupun dengan instansi lain di luar SMU sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 14

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas, hasil kerja, dan kinerja penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan undangan yang berlaku.

Pasai 15

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikuti dan memenuhi tugas, jawab kepadanya atas tuntutan dan pertanyaan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Pasal 16

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, memerintah, dan melaksanakan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasai 17

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dan bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha, dalam menyampaikan laporan wajib memberitahukan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja:

Pasal 19

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Kependidikan.

BAB V
BIAYA

Pasal 20

Bizya untuk pemasaran Keputusan ini dibebankan pada masing-masing anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI
LOKASI

Pasal 21

Sejak ditetapkannya Keputusan ini SMU berjumlah 2.465 dengan rekapitulasi, nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMU ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penggunaan aparat negara

SMA yang diselenggarakan oleh makyratka menyatakan dengan Keputusan ini

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0371/O/1978 dinyatakan tidak berlaku

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dicapai.

Dicapai di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

nd

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djajonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

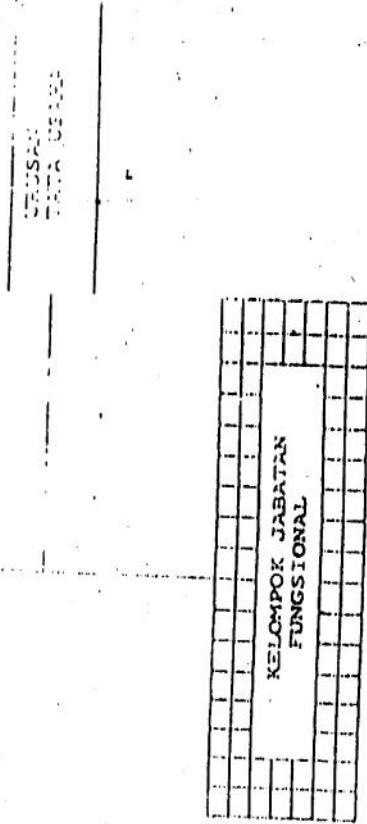
- Sampai dengan hari ini
Kasus Kasir Pemerintah dan Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- XII.1203.753
1. Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Perencanaan Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbatahanaraan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan
Kasus Kasir Pemerintah dan Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Ungu

BAGAN ORGANISASI SMU

K E P A L A
SAYAH NEPALA



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TRA

Surat ini merupakan surat resmi
Kepada Bapak Entomo dan Pak Subaryono Menteri
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
NIP. 19321212 1982 02 001

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Wardiman Dj
Menteri
NP. 19321212 1982 02 001

